

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian (Partai Kebangkitan Bangsa)

1. PKB dalam kilasan sejarah⁵⁴

Hampir semua warga Nahdhiyin dan elit-elitnya bersepakat bahwa berdirinya PKB merupakan jasa besar NU. Namun, jikalau dikatakan PKB adalah satu-satunya partai yang berhak di fasilitasi NU, lebih-lebih seluruh warganya harus memiih PKB, maka cukup banyak tokoh teras ormas ini yang tidak setuju, akan menentang dengan sangat kerasa. Karena, banyak partai selain PKB yang juga didirikan oleh warga NU. Yang pasti PBNU sebagai ujung tombak pengambil keputusan organisasi ini sangat banyak berperan terhadap proses dari awal hingga akhir pendirian PKB. Itulah mengapa orang-orang NU yang banyak berada di belakang PKB, terutama KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang lebih suka meneguhkan PKB sebagai partainya wong NU.

Problem mendasar yang hingga hari ini masih menjadi perdebatan cukup panjang di tubuh PKB sendiri sebagai partai independen dan NU sebagai kekuatan di luar jalur politik adalah kemurnian Khitah NU 1926. Secara sederhana Khitah 1926 adalah patokan dasar yang paling prinsip dari setiap program organisasi yang

⁵⁴ www.dpp-pkb.org lihat e-book (Saya Bekerja Maka PKB Menang (ebook pkb).html lihat juga dalam Nahrawi, imam, *moralitas politik PKB, Aktualisasi PKB sebagai partai kerja, partai nasinal dan partai modern*, Averroes press, MALANG, 2005 Halm 13

menghendaki adanya jarak dengan dunia politik, bahkan sama sekali berada diluar mekanisme Konstelasi politik. Sedang NU sendiri, tidak bisa tidak, dalam sejarah selalu di belit persoalan tersebut. Semasa masih menjadi partai dan mengikuti proses pemilu tahun 1955, NU pernah dianggap telah menyelewengkan Khitah dan amanat para Kiyai.

Begitu juga ketika pernah bergandengan mesra dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), NU lagi-lagi merasa dikhianati. Ujung-ujungnya yang menjadi tuduhan saat itu adalah sikap Inkonsistensi NU yang selalu saja berusaha mencari jalan kompromi mana kala melibatkan diri dengan praksis politik serta mendukung partai tertentu. Begitu pun ketika PKB muncul, suara-suara kontra terhadap keberadaan partai ini sekaligus profesionalitas partai menjunjung tinggi AD/ART, ternyata juga mendapat banyak kecaman minor. PKB di anggap sebagai representasi baru hantu politik yang pernah lama menjangkiti NU.

Bagi sebagian kalangan NU -terutama dalam menyikapi amanat Khitah 1926-pemurniana NU sebagai gerakan keagamaan memang tidak mutlak harus dilakukan dengan mengambil jarak yang seluas-luasnya dengan kekuasaan. Kekuasaan, konon memang harus diakrabi sedemikian rupa sehingga pelaksanaan kekuasaan tersebut tidak membawa madharat. Dan Nu adalah salah satu moral Suport-nya. Kendati

demikian, secara Institusional, Nu memang tidak boleh terlibat jauh dalam praktik-praktik politik praktis⁵⁵

Bagaimana pun juga, eksistensi PKB saat ini tidak perlu diseret terlalu jauh ke dalam masa kelam ormas penyokongnya. NU pada masa lalu jelas merupakan satu-satunya organisasi kemasyarakatan dan keagamaan ditengah-tengah masyarakat yang selalu mendapat penindasan sangat kuat dari penguasa Orde Baru. PKB hadir dalam rangka semata-mata mengobati luka lama itu. Sementara historisitas konfigurasi politik Nu justru menjadi pelajaran berharga agar bagaimana paratai ini kedepan tidak lagi menjadi “bulan-bulanan” kekuasaan, lebih-lebih hanya dianggap sebagai “anak bawang”.

2. Sejarah kelahiran PKB⁵⁶

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser dari presiden sebagai akibat desakan arus reformasi yang kuat, mulai yang mengalir dari diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, sampai istighosah dan lain sebagainya.

Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut era reformasi. Euforia era reformasi yang ditandai dengan peralihan tahta dari Soeharto ke BJ Habibie memberikan angin segar bagi dunia perpolitikan Indonesia,

⁵⁵ Misrawi, 2004 dalam Nahravi, imam, *moralitas politik PKB, Aktualisasi PKB sebagai partai kerja, partai nasinal dan partai modern*, MALANG, Averroes press, 2005 hal 14

⁵⁶ Nahravi, imam, *moralitas politik PKB, Aktualisasi PKB sebagai partai kerja, partai nasinal dan partai modern*, MALANG, Averroes press, 2005 hal 15 lihat juga dalam www.dpp-pkb.org lihat e-book (Saya Bekerja Maka PKB Menang (ebook pkb).htm lihat hal 24 jati diri partai dalam sejarah

khususnya kepartaian. Begitu banyak partai yang bermunculan pada saat itu. Para pengamat menilai fenomena ini adalah buah dari adanya akumulasi berbagai persoalan ideologi politik bangsa yang hampir tiga puluh tahun lebih diperlakukan secara diskriminatif dalam pembentukan platform politik bangsa ini.

NU sendiri rupanya tidak mau ketinggalan. Setelah hampir tiga dasawarsa NU juga ikut tergerus marginalisasi politik penguasa, ormas ini setidaknya digugah warga jam'iyah-nya untuk urun rembug di kancah perpolitikan nasional melalui pendirian partai. Hal itu tersirat dari banjirnya surat yang masuk ke PBNU yang dikirim kaum Nahdliyin, sehari setelah mundurnya Soeharto. Sebagai bentuk usulan dan masukan dari warganya, surat tersebut dikirim dengan berbagai cara. Ada yang melalui faksimili, telegram, surat-surat, email, bahkan ada yang langsung ke Sekretariat Jendral PBNU. Para pengirimnya ada yang berasal dari perorangan, kelompok dan pengurus di lingkungan NU, baik pengurus vertikal NU maupun badan otonomi dan lembaga di lingkungan NU. Hampir semua usulan bernada sama, yakni agar secepat mungkin PBNU membantu mewujudkan adanya satu wadah untuk menyalurkan aspirasi politik warga NU.

Meskipun usulan tersebut intinya sama, namun permintaannya beragam, ada yang mengusulkan agar PBNU Membentuk partai politik (parpol), ada juga yang mengusulkan agar NU menjadi parpol. Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan, dan nama yang paling banyak muncul adalah Nahdliotul ummah, Kebangkitan umat, Kebangkitan bangsa.

Ada juga yang mengusulkan lambang parpol. Unsur-unsur yang terbanyak di usulkan untuk lambang parpol adalah gambar bumi, bintang sembilan dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART parpol, ada juga yang mengusulkan semuanya. Salah satunya yang menjadi acuan adalah lajnah sebelas rembang yang di ketuai KH M Cholil bisri dan PWNu Jawa barat.

Semua usulan dan bahkan nama-nama yang di ajukan ke PBNU mencirikan lambang NU, tentang hubungan parpol baru dengan NU, dan siapa yang layak menjadi pengurus priode pertama, juga di usulkan secara detail. Usulan yang paling lengkap adalah dari lajnah rembang, yang di ketuai oleh KH Chilil bisri dan PWNu Jawa barat, sebelum usulan dari lajnah sebelas rembang masuk ke PBNU, sejumlah ulama dan tokoh nu berembug dulu di kantor PWNu Jawa timur, senin 25 mei 1998, atau empat hari setelah soeharto lengser.

Mereka membahas berbagai kemungkinan seputar lahirnya partai baru di lingkungan NU. Pembahasan kemudian di lanjutkan pada 27 mei 1998, dan setelah agak sempurna di umumkan pada acara *istighosah akbar ke II* di lapangan makodam V/ brawijaya pada hari ahad tanggal 31 mei 1998. Kemudian agar lebih sempurna lagi, gagasan pendirian partai tersebut di bawa keforum pertemuan ulama di rembang, Jawa tengah pada sabtu 6 juni 1998⁵⁷

⁵⁷ khoirudin, 2005 Nahravi, imam, *moralitas politik PKB, Aktualisasi PKB sebagai partai kerja, partai nasional dan partai modern*, MALANG, Averroes press, 2005 halm 23 lihat juga dalam www.dpp-

menyelesaikan konsep pembentukan partai politik baru di lingkungan NU secara komprehensif. Konsep itu kemudian di usulkan pada PBNU atas nama lajnah sebelas rembang.

Atas dasar itu pula, para kiai khos yang semula hanya menganjurkan melakukan istighosah, pada ahimya merestui berdirinya parpol di lingkungan NU. Dan sejak itu tepatnya sehari setelah lengser. PBNU (Pengurus Besar Nahdlotul

Pada saat di rembang inilah sebuah tim yang terdiri dari 11 orang berhasil menyelesaikan konsep pembentukan partai politik baru di lingkungan NU secara komprehensif. Konsep itu kemudian di usulkan pada PBNU atas nama lajnah sebelas rembang.

Atas dasar itu pula, para kiai khos yang semula hanya menganjurkan melakukan istighosah, pada ahirnya merestui berdirinya parpol di lingkungan NU. Dan sejak itu tepatnya sehari setelah lengser, PBNU (Pengurus Besar Nahdliotul Ulama) kebanjiran usulan dari warga nahdliyyin di seluruh pelosok tanah air. Seperti yang telah di laporkan wakil sekjen PBNU (saat itu Drs.arifin djunaidi MBA), Berbagai cara telah di tempuh warga dan juga pengurus NU untuk menyampaikan usulan tersebut. Ada yang datang langsung ke kantor PBNU ada yang melalui telepon, faksimili, email, dan banyak pula yang menyampaikan usulan ke kantor PBNU di daerah. Sedangkan isi usulanya Cuma satu, yakni agar PBNU Mendirikan partai politik atau NU menjadi partai politik lagi.

Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat nahdliyyin, PBNU Menanggapinya secara hati-hati. Hal ini di dasarkan dengan adanya kenyataan hasil muktamar NU ke 27 di situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Namun demikian, dikap yang di tunjukan oleh PBNU tidak memuaskan

warga nahdliyin. Banyak pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat. Di antara yang sudah mendeklarasikan sebuah parpol adalah partai bintang Sembilan di purwokerto dan partai kebangkitan umat di Cirebon.

Akhirnya, PBNU mengadakan rapat harian syuriah dan tahfidziah PBNU pada tanggal 3 juni 1998 yang menghasilkan untuk membentuk tim 5 yang di beri tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim lima di ketahui oleh KH Ma'ruf amin,(rais syuriah/kordinator harian PBNU) dengan anggota KH M Dawwam anwar (khatib aam PBNU) HM Rozy Munir, SE. MSc. (ketua PBNU), dan Ahmad bagdja (sekertaris jendral PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim lima ini berikutnya menjadi wadah untuk membentu partai politik di bekal surat keputusan PBNU. Tim lima inilah yang kemudian membentuk partai poltik yang menampung aspirasi politik warga NU⁵⁸.

Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja tim lima seiring semakin derasnya usulan warga NU untuk menginginkan partai politik, maka pada rapat harian syuriah dan tahfidziah PBNU tanggal 20 juni 1998 memberi surat tugas kepada tim lima, selain itu juga di bentuk tim asistensi. Tim Asistensi terdiri dari 9 orang aktivis Nahdlatul Ulama, karenanya disebut juga Tim Sembilan. Mereka adalah : H. Zainal Arifin Junaidi (Wakil Sekjen PBNU, sebagai Ketua Tim), KH. Fachri Thaha Ma'ruf (Wakil Katib Syuriah), H. Muhyiddin Arubusman (Wakil Sekjen

⁵⁸ www.dpp-pkb.org lihat e-book (Saya Bekerja Maka PKB Menang (ebook pkb).htm

PBNU), H. M. Nasihin Hasan (LSM), H. Andi Muawiyah Ramly (Ketua PP. LKKNU), H. Abdul Aziz (Birokrat Departemen Agama RI), H. Lukman Hakim Saifuddin (PP. Lakpesdam NU), H. Amin Said Al Husni (PP. GP. Ansor), dan HA. Muhaimin Iskandar (PB. PMII). Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam menginventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi politik NU⁵⁹.

Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim lima dan tim asistensi mengadakan rapat untuk mengidentifikasi dan mengelaborasi tugas-tugasnya. Pada tanggal 26-28 Juni 1998 di Villa La Civi Cipanas, Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan kosinyering untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol dan hasil rancangannya berupa : (1) Pokok-pokok pikiran NU mengenai reformasi politik, yang berisi tentang perlunya kehidupan yang lebih demokratis dan dikembalikannya kedaulatan kepada rakyat; (2) Mabda' Siyasy yang antara lain memuat visi, misi dan strategi PKB; (3) Hubungan PKB dengan NU; (4) AD/ART; (5) Naskah Deklarasi (dokumen naskah deklarasi PKB).

Melalui berbagai diskusi intensif, pada tanggal 4-5 Juli 1998 di Bandung, rancangan tersebut diajukan pada Forum Silaturahmi Nasional Ulama dan Tokoh NU yang diikuti peserta dari 22 PWNU, penggagas, ulama, dan para tokoh NU yang menghasilkan banyak masukan. Setelah melalui diskusi verifikasi pada 30 Juni 1998,

⁵⁹ Ibid., lihat sejarah pendirian partai hal 24

dan diskusi final pada 17 Juli 1998, maka Tim Lima dan Tim Asistensi menyerahkan hasil akhir rancangannya kepada rapat harian PBNU pada tanggal 22 Juli 1998.

Akhirnya, Hasil tim ini lah yang kemudian berwujud PKB yang secara resmi di deklarasikan pada 23 Juli 1998 di kediaman KH. Abdurrahman Wahid, Ciganjur, Jakarta selatan. Deklaratornya terdiri dari: KH. Moenasir Ali, KH. Muchith Muzadi, KH. Ilyas Ruchiyat, KH. Musthofa Bisri dan KH. Abdurrahman Wahid Sesuai harapan warga NU dan bangsa Indonesia, PKB diharapkan dapat bersama komponen bangsa lainnya membangun masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia mencapai cita-cita bangsa (dokumen histori pendirian PKB).

Selanjutnya sebagai landasan perjuangan PKB di sektor setruktural, dirumuskan *mabda' siasy* (titik tolak politik) dengan pendekatan Fiqih siasi dalam bernegara, sebagaimana yang telah menjadi bagian dari tradisi. Posisinya dengan NU, disamping sebagai partai yang berdirinya difasilitasi oleh NU, PKB diharapkan merumuskan langkah-langkah kedepan yang nantinya lebih kepada upaya-upaya memberikan wadah bagi kalangan NU untuk berjuang pada Lini struktural dengan berkecimpung dalam proses pembuatan kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat, sedang NU dalam kerangkanya tetap berbasis kepada gerakan yang bersifat kultural (Iskandar, 1998).

3. Tokoh-tokoh yang membidani berdirinya PKB⁶⁰

Munculnya PKB hingga menjadi seperti sekarang tentu tidak bisa dilepaskan dari peran besar para Kiyai dalam proses kelahirannya. Kiyai adalah figur dalam tradisi NU yang selalu dimintai saran sekaligus pendapat dalam setiap pengambilan keputusan di organisasi ini. PBNU pun merupakan markas besar partai yang juga dihuni oleh sebagian besar kiyai yang berpengaruh di tingkat nasional.

Menurut mabda' siasy PKB, ada lima orang kiai yang turut serta membidani proses kelahiran partai ini mulai awal hingga akhir. Mereka adalah para tokoh PBNU yaitu : KH M. Ilyas ruhiyat, KH.Moenatsir ali, KH A. Muchit muzadi, KH. Mustofa bisri, dan tentunya tidak ketinggalan adalah tokoh KH. Abdurahman wahid (Gus dur). Kelima tokoh ini bersama para ulama dan tokoh-tokoh NU lainnya mendeklarasikan PKB, tepatnya pada tanggal 23 juli 1998. Deklarasi tersebut merupakan puncak dari peran aktiv PBNU membidani kelahiran PKB. Sejarah partai baru yang lahir dari rahim NU Pun di mulai dan hari itu pun merupakan sebuah momentum yang tidak pernah di lupakan oleh warga NU dan PKB serta bagi warga nahddhiyin dan bagi masarakat indonesia pada umumnya

Bila melihat prosesnya kebelakang sejak dari banyaknya usulan dan saran yang masuk ke PBNU, tentunya banyak kiai dan tokoh-tokoh NU yang tidak bisa dilupakan. Sebab mulai dari dibentuknya Tim Lima dan Tim Asistensi merupakan

⁶⁰ www.dpp-pkb.org lihat e-book (Saya Bekerja Maka PKB Menang (ebook pkb).html lihat juga dalam Nahrawi, imam, *moralitas politik PKB, Aktualisasi PKB sebagai partai kerja, partai nasinal dan partai modern*, Averroes press, MALANG, 2005 Halm 21-27

tokoh-tokoh vital di tubuh NU seperti KH Ma'ruf Amin (Rais Surya/ Koordinator harian PBNU) yang sekaligus ketua Tim Lima dan beranggotakan KH M Dawwam anwar (khatib aam PBNU) HM Rozy Munir, SE. MSc. (ketua PBNU), dan Ahmad bagdja (sekertaris jendral PBNU). Adalah pionir yang selalu bekerja keras mewujudkan amanat umat nahdhiyin. Mereka selalu keluar masuk kantor PBNU serta melakukan berbagai koordinasi dengan PWNU di daerah serta kantong-kantong NU yang lain (khoirudin, 2005)

Tentunya tokoh-tokoh yang membidani kelahiran PKB tidak terbatas pada orang-orang yang saat itu menjabat sebagai pengurs di PBNU, baik syuriysh maupun tanfidziyah, namun berdirinya PKB tidak pula hanya bergantung pada kinerja tim lima dan tim asistensi. Sebab banyak kiai-kiai khos dan kiai-kiai besar yang rata-rata berposisi sebagai pemangku pondok pesantren yang cukup dikenal dikalangan masyarakat terutama warga nahdiyyin yang memberi masukan dan nasihat terus-menerus mengenai harapan dan cita-cita pendirian sebuah partai yang difasilitasi oleh NU. Bahkan, dikalangan para kiai tersebut tidak sedikit yang memberikan usulan brilian bagaimana seharusnya prosesi dan mekanisme pendirin partai politik di tubuh NU dan mewanti-wanti supaya tidak sekali-kali melupakan kesejarahan NU yang dulunya pernah menjadi partai politik serta wejangan-weangan konstruktif lainnya. Yang paling penting dalam mencermati para tokoh dibelakang layar tersebut adalah banyak diantara para ulama tersebut yang mengantisipasi terlebih dahulu mengenai posisi NU-PKB nantinya. Lebih baik menegaskan posisi masing-masing dan prosedur

yang selama ini menjadi ptokan di tubuh NU sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang tidak hanya terbatas atau dibatasi oleh partai saja kerana NU adalah milik semua warga Nahdiyyin dan bangsa Indonesia, bukan hanya milik PKB⁶¹

Kondisi ini sesungguhnya relevan dengan situasi yang terjadi saat itu paska kemnuculan banyak partai yang berhaluan Islam, bahkan dengan latar belakang Nahdatul ulama. Apalagi situasi cukup memanas menjelang dimulainya kampanye pemilu 1999. Kita menyaksikan betapa antar jurkamarai satu dengan yang lain mencoba merebut pangsa pasar warga NU, saling mengklaim satu sama lain. PKB sebagai partai yang difassilitasi Nu menganggap paling layak dipilih karena proses panjang pendirannya tidak bisa dilepaskan dari campur tangan NU, berbeda dengan partai-partai lain yang walaupun juga didirikan oleh tokoh NU namun tidak mempunyai kredibilitas dimata PBNU seperti halnya PKB. Tokoh-tokoh yang mengawal dan mengurus PKB paska didirikannya partai ini pada 23 Juli 1998 adalah jawaban konkritnya, meskipun beberapa kalangan menganggap PKB terkesan mengandung unsur nepoitisme karena yang duduk di jajaran struktural PKB tidak jauh dari keluarga, kerabat dan orang-orang dekat Gus Dur.

Sementara itu pilihan Gus Dur pada sosok Mattori Abdul Jalil sebagai ketua umum pertama PKB jga didasarkan atas pertimbangan matang. Disamping pengalamannya yang luas, hubungannya dengan orang-orang golongan non Nu juga cukup bagus. Sehingga adanya protes atas pengangkatan Mattori diabaikan oleh Gus

⁶¹ Ibid.

Dur dan penunjukan Muhaimin Iskandar sebagai sekjen PKB pertama juga tidak lain dalam rangka penyiapan sebagai PKB sebagaipartai anak muda. Dalam hal ini pertimbangan Gis Dur adalah untuk menjadikan PKB sebagai partai yang tidak terlepas dari perjalanan perjuangan politik sebelumnya. Yaitu seluruh rangkaian dari gerakanpro demokrasi yang selama ini keduanya terlibat bersama Gus Dur mulai dari gerakan forum demokrasi, YKPK, dan gerakan mementang otoritarianisme dalam berbagai variasinya.⁶²

Terlepas dari berbagai macam konflik dan perpecahan yang terjadi ditubuh PKB dalam proses perjalanannya PKB berprinsip: orang-orang yang dipilih untuk mengawal PKB harus berwawasan ke-kiai-an, tunduk kepada kiai dan memahami dinamika kiai terutama kiai-kiai NU. Sebab PKB tidak mungkin dan tidak akan pernah mungkin berdiri tanpa “sentuhan” dan pertimbangan matang para kiai. Itulah mengapa Slahuddin wahid (adik Gus Dur) pernah berujar “Gus Dur percaya bahwa seorang kiai adalah segalanya, sosok *sarwo linuwih* yang mampu memberi jawaban atas peristiwa yang sedang dan akan terjadi.” Eksistensi PKB berarti juga menunjukkan eksistensi kiai⁶³.

Sekilas tidak ada bedanya bidan kelahiran PKB dengan bidan dari partai-partai Islam lain. Pada masa lalu, ketika NU masih menjadi partai, bidannya juga dari

⁶² Iskandar,2004. Dalam Nahravi, imam, *moralitas politik PKB,Aktualisasi PKB sebagai partai kerja,partai nasinal dan partai modern*,Averroes press, MALANG, 2005 Halm 21

⁶³ khoiruddin,2005 dalam *ibid.*, Halm21

kalangan kiai. Setelah itu masa transisi pun akhirnya memunculkan PPP sebagai partai dari NU, kelahirannya pun tidak lepas pula dari para kiai.

Satu hal yang menarik, partai dari lingkaran NU pada saat itu hampir tidak seberapa mendapat tekanan dari elit-elit kiai yang lain, terutama ada di jalur NU. Hal itu disebabkan oleh bersatunya semangat ideologis para kiai untuk mengontrol kinerja penguasa saat itu dipandang cukup ketat memainkan mekanisme kepartaian. Bukan suatu rahasia jikalau orde baru adalah rezim otoritarianisme yang tidak akan segan-segan menghabisi partai lain jika dianggap mulai berbuat macam-macam. Sementara pada zaman pemilu 1995, seperti integral para ulama saat itu lebih disebabkan karena prosesi politik yang baru saja terlepas dari kungkungan penjajah, meskipun masih tidak sepenuhnya. Selain itu, partai Nu juga berdiri disamping beragam partai lain yang lebih menonjolkan kekuatan basis ideologi.

Sementara itu kelahiran PKB adalah buah dari ketepatan mengambil keputusan pada waktu dan momen yang tepat reformasi sebagai manifestasi tergulingnya penguasa yang tiran di gadang-gadang menjadi awal proses demokratisasi kembali, setidaknya tidaknya sama dengan ketika dulu NU pernah menjadi partai yang besar. Namun, untuk meraih soliditas ditengah-tengah warna kiai yang beragam tentu saja sulit. Banyak kalangan yang beranggapan NU telah cukup dewasa berpolitik dengan keberagaman tersebut. Apalagi Gus Dur sebagai motor pembongkar kemapanan berpikir para kiai cukup berani tampil garang di "depan panggung". Tekanan-tekanan sebegini kiai pada saat bidan-bidan PKB

memberanikan diri mengikrarkan partai ini justru dianggap sebagai momen dimana proses demokrasi internal NU berjalan. Jadi, titik tekan mengapa kelima deklarator PKB mengambil sikap cepat dan cerdas mendeklarasikan partai ini bukan karena pertentangan atau perbedaan diantara para sikap kiai yang sudah semenjak zaman dahulu, namun semata-mata ingin mengawal demokrasi dari dalam dan Gus Dur adalah salah satu aktornya.

4. Pola hubungan PKB dengan NU⁶⁴

Dengan merujuk pada landasan politik NU dan cita-cita politik partai, maka setiap anggota dan aktifis PKB harus mengembangkan pola hubungan dengan NU sebagai berikut:

- a. Hubungan Historis, berarti harus disadari bahwa PKB dirintis dan dilahirkan oleh sejumlah warga NU secara perorangan sebagai wujud kepedulian mereka terhadap masa depan kehidupan politik bangsa dan tekad melaksanakan cita-cita politik NU mengangkat harkat dan martabat warganya.
- b. Hubungan Kultural, berarti harus disadari bahwa PKB lahir dari suatu lingkungan kebudayaan yang khas yakni lingkungan kebudayaan yang dibentuk oleh nilai-nilai keagamaan Islam Ahlusunnah wal Jama'ah.
- c. Hubungan Aspiratif, berarti harus disadari bahwa NU sebagai sebuah jam'iyah memiliki landasan, pandangan dan sikap politik, dan karenanya

⁶⁴ www.dpp-pkb.org lihat e-book (Saya Bekerja Maka PKB Menang (ebook pkb).htm lihat hal 26

mereka harus turut memperjuangkan landasan, pandangan, dan sikap politik tersebut dalam keseluruhan gerak dan langkah partai

5. Visi Misi dan Mabda' Syiyasi Sebagai Ideologi PKB

Sebagai wadah penyalur aspirasi politik kaum *Nahdiyyin*, PKB tentu saja memiliki visi misi, sekaligus cita-cita politik yang sedikit banyak bersumber dari landasn politik NU. Visi merupakan manifestasi mengaplikasikan misi partai yang berlandaskan *mabda'siyasiy, cita-cita politik, asas dan prinsip perjuangan, sifat dan fungsi, tujuan dan usaha, garis perjuangan, serta program-program partai*. Oleh karena itu, visi dan misi partai ini adalah dua hal yang saling berkaitan erat satu sama lain.⁶⁵

Mabda'siyasiy sebagai landasan utama PKB (ideologi) dan berisikan sembilan poin pertanyaan didalamnya adalah perwujudan visi dan misi partai secara umum. Isi dari *Mabda'siyasiy* adalah:

MABDA' SIYASY PARTAI KEBANGKITAN BANGSA⁶⁶

- a. Cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur sejahtera lahir dan batin, bermartabat dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain didunia, serta mampu mewujudkan suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

⁶⁵ Nahrawi, imam, *moralitas politik PKB, Aktualisasi PKB sebagai partai kerja, partai nasinal dan partai modern*, MALANG ,Averroes press, , 2005 halm 28

⁶⁶ www.dpp-pkb.org (lihat mabda' siyasi)

melindungi segenap bangsa Indonesia menuju tercapainya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

- b. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan bersumber pada hati nurani (*as-shidqu*), dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi (*al-amanah wa al-wafa-u bi al-ahdli*), bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi (*al-'adalah*), tolong menolong dalam kebajikan (*al-ta'awun*) serta konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama (*al-istiqomah*) musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial (*al-syuro*) yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga negara didepan hukum (*al-musawa*) adalah prinsip dasar yang harus ditegakkan.
- c. Dalam mewujudkan apa yang selalu dicita-citakan tersebut, misi utama yang dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya. Yang meliputi, terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan, terpenuhinya hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan, hak atas penghidupan/perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiayaan

(hifdzu al-Nafs), terpeliharanya agama dan larangan adanya pemaksaan agama (hifdzu al-din), terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi serta berpendapat (hifdzu al-Aql), terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus (hifdzu al-nasl) dan terpeliharanya harta benda (hifdzu al-mal). Misi ini ditempuh dengan pendekatan amar ma'ruf nahi munkar yakni menyerukan kebajikan serta mencegah segala kemungkinan dan kenyataan yang mengandung kemunkaran.

- d. Penjabaran dari misi yang di emban guna mencapai terwujudnya masyarakat yang dicitakan tersebut tidak bisa tidak harus dicapai melalui keterlibatan penetapan kebijakan publik. Jalur kekuasaan menjadi amat penting ditempuh dalam proses mempengaruhi pembuatan kebijakan publik melalui perjuangan pemberdayaan kepada masyarakat lemah, terpinggirkan dan tertindas, memberikan rasa aman, tenteram dan terlindungi terhadap kelompok masyarakat minoritas dan membongkar sistem politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya yang memasung kedaulatan rakyat. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, upaya mengartikulasikan garis perjuangan politiknya dalam jalur kekuasaan menjadi hal yang niscaya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Partai Kebangkitan Bangsa sadar dan yakin bahwa kekuasaan itu sejatinya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan yang ada pada diri manusia merupakan titipan dan amanat Tuhan yang dititipkan kepada manusia yang oleh manusia hanya bisa diberikan pada pihak lain yang memiliki keahlian

dan kemampuan untuk mengemban dan memikulnya. Keahlian memegang amanat kekuasaan itu mensyaratkan kemampuan menerapkan kejujuran, keadilan dan kejuangan yang senantiasa memihak kepada pemberi amanat.

f. Dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kekuasaan yang bersifat demikian itu harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama yang mampu menebarkan rahmat, kedamaian dan kemaslahatan bagi semesta. Manifestasi kekuasaan itu harus dipergunakan untuk memperjuangkan pemberdayaan rakyat agar mampu menyelesaikan persoalan hidupnya dengan lebih maslahat. Partai Kebangkitan Bangsa berketetapan bahwa kekuasaan yang hakekatnya adalah amanat itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan dan dapat dikontrol pengelolaannya oleh rakyat. Kontrol terhadap kekuasaan itu hanya mungkin dilakukan manakala kekuasaan tidak tak terbatas dan tidak memusat di satu tangan, serta berada pada mekanisme sistem yang institusionalistik, bukan bertumpu pada kekuasaan individualistik, harus selalu dibuka ruang untuk melakukan kompetisi kekuasaan dan perimbangan kekuasaan sebagai arena mengasah ide-ide perbaikan kualitas bangsa dalam arti yang sesungguhnya. Pemahaman atas hal ini tidak hanya berlaku saat memandang kekuasaan dalam tatanan kenegaraan, melainkan juga harus terefleksikan dalam tubuh internal partai.

g. Partai Kebangkitan Bangsa menyadari bahwa sebagai suatu bangsa pluralistik yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, tatanan kehidupan bangsa

Indonesia harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut haruslah dijiwai dengan sikap mengembangkan hubungan tali persaudaraan antar sesama yang terikat dengan ikatan keagamaan (ukhuwah diniyah), kebangsaan (ukhuwah wathoniyah), dan kemanusiaan (ukhuwah insaniyah), dengan selalu menjunjung tinggi semangat akomodatif, kooperatif dan integratif, tanpa harus saling dipertentangkan antara sesuatu dengan yang lainnya.

- h. Partai Kebangkitan Bangsa bercirikan humanisme religius (insaniyah diniyah), amat peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan yang agamis, yang berwawasan kebangsaan. Menjaga dan melestarikan tradisi yang baik serta mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik untuk ditradisikan menjadi corak perjuangan yang ditempuh dengan cara-cara yang santun dan akhlak karimah. Partai adalah ladang persemaian untuk mewujudkan masyarakat beradab yang dicitakan, serta menjadi sarana dan wahana sekaligus sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan bangsa. Partai dalam posisi ini berkehendak untuk menyerap, menampung, merumuskan, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna menegakkan hak-hak rakyat dan menjamin pelaksanaan ketatanegaraan yang jujur, adil dan demokratis.

- i. Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai terbuka dalam pengertian lintas agama, suku, ras, dan lintas golongan yang dimanestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan. Partai Kebangkitan Bangsa bersifat independen dalam pengertian menolak segala bentuk kekuasaan dari pihak manapun yang bertentangan dengan tujuan didirikannya partai.

Sedangkan visi dan misi partai ini dapat digolongkan lagi menjadi beberapa sub seperti tersebut diatas, yaitu⁶⁷:

- a. *cita-cita politik PKB*, yakni terwujudnya masyarakat dan bangsa Indonesia yang adil dan makmur, merdeka dan berdaulat, yang terjamin hak-hak asasinya, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan keselamatan dari segala bentuk penganiayaan, kebebasan dari pemaksaan agama, perusakan keturunan serta kebebasan harta benda secara sah (Dokumen Historis PKB).
- b. *Asas Dan Prinsip perjuangan PKB* sebagai penjelas misi partai, yakni seperti bunyi lima sila dalam pancasila. Pada Anggaran Dasar (AD) partai, ini termaktub dalam pasal 3 PKB tahun 1998-2000. *Ketiga*, sifat dan fungsi PKB yang juga masih menjelaskan misi partai, yakni bersifat kebangsaan, demokratis dan terbuka (Pasal 5 AD PKB tahun 1998-2000). Sedangkan pasal 6 dengan tahun yang sama, PKB mempunyai fungsi sebagai wadah

⁶⁷ www.dpp-pkb.org (lihat mabda' syiyasi) lihat juga dalam Nahrawi, imam, *moralitas politik PKB, Aktualisasi PKB sebagai partai kerja, partai nasional dan partai modern*, MALANG, Averroes press, , 2005 halm 28 dan juga dapat di lihat di www.dpp-pkb.org lihat e-book (Saya Bekerja Maka PKB Menang (ebook pkb).htm 27

berhimpun bagi setiap warga negara Indonesia dengan tanpa membedakan asal-usul, keturunan, suku, golongan, agama dan profesi. PKB juga berfungsi sebagai wadah meningkatkan pendidikan, kesadaran, partisipasi politik, saluran aspirasi politik rakyat, serta sarana artikulasi dan agregasi kepentingan-kepentingan rakyat di dalam lembaga politik.

- c. *Tujuan Dan Usaha* PKB sebagai penjelas visi partai, yakni mewujudkan cita-cita kemerdekaan RI sebagai mana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual, serta mewujudkan tatanan politik yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah. *Kelima*, garis perjuangan PKB yang dalam hal ini meliputi prinsip dasar perjuangan dan politik partai. *Keenam*, program kerja PKB sebagai penjelas visi PKB yang meliputi seluruh aspek kehidupan, mulai ekonomi, agama, politik, HAM, hukum, kesejahteraan sosial, pendidikan dan lingkungan hidup (Iskandar, 2001).

6. Garis Perjuangan Partai PKB

a. Prinsip Dasar Perjuangan PKB (Platform)⁶⁸

- 1) Dasar perjuangan partai bertumpu pada nilai-nilai kebangsaan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
- 2) Menjunjung tinggi etika dan moralitas yang bersumber pada spiritual kebangsaan Indonesia serta menghormati kemerdekaan bangsa-

⁶⁸ www.dpp-pkb.org lihat e-book (Saya Bekerja Maka PKB Menang (ebook pkb).htm

bangsa di dunia untuk mewujudkan Tata Dunia Baru yang lebih adil, aman dan sejahtera.

- 3) Mengakui pluralitas masyarakat bangsa sebagai kekayaan dan menolak secara tegas segala bentuk unifikasi yang kontra produktif dengan semangat pluralisme.
- 4) Memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, keadilan sosial, kesejahteraan, dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
- 5) Memperjuangkan terciptanya tatanan pemerintahan yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat.
- 6) Menciptakan masyarakat sipil yang terbuka, mandiri dan kuat berdasarkan persamaan, perdamaian, persatuan dan persaudaraan.
- 7) Memperjuangkan supremasi hukum berdasarkan pada penghargaan dan penghormatan terhadap HAM.
- 8) Mewujudkan masyarakat yang bebas dari rasa takut dan belenggu yang memasung kehidupan rakyat.
- 9) Memperjuangkan kemandirian ekonomi rakyat yang bertumpu pada kekuatan sumber daya alam pertanian dan maritim.
- 10) Peduli pada persoalan-persoalan dunia yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung pada eksistensi manusia dan kemanusiaan.

b. Garis perjuangan partai sebagai kelanjutan dari visi misi partai

Seperti disinggung diatas, visi dan misi PKB yang nantinya di jadikan sebagai landasan dari garis perjuangan PKB tetap tidak bisa dilepaskan dari visi dan misi NU. Sementara Nahdlotul Ulama sendiri sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuannya melalui serangkaian ikhtiar yang didasari oleh dasar-dasar paham keagamaan yang membentuk kepribadian khas nahdlotul ulama, Inilah yang kemudian disebut sebagai Khittah NU (*khittah nahdlotul ulama.muqodimah*)⁶⁹. Karena visi sekaligus misi PKB memang tidak dilepaskan dari Khittah NU, maka terlebih dahulu kita harus memahami betul apa sebenarnya Khittah tersebut. Pengertian Khittah NU adalah

pertama : landasan berpikir, bersikap dan bertindak warga NU yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Kedua: Landasan tersebut adalah paham Islam *ahlussunnah wal jamaah* yang diterapkan menurut kondisi masyarakat Indonesia, meliputi dasar-dasar amal keagamaan maupun kemasyarakatan. Khittah Nu juga digali dari intisari perjalanan sejarah khidmahnya dari masa kemasyarakatan.

Ketiga: Khittah Nahdlotul Ulama juga digali dari intisari perjalanan sejarah khidmatnya dari masa ke masa.

⁶⁹ Ridwan, nur kholik, *NU dan bangsa 1914-201: pergulatan politik dan kekuasaan*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta,2010. Halm 461

Dasar-dasar paham keagamaan NU sendiri merujuk pada sumber ajaran Islam: Al-Qur'an, Assunnah, Ijma', dan Qiyas. Di samping itu, dalam memahami dan menafsirkan Islam dari sumber-sumbernya tersebut di atas, NU mengikuti paham Ahlussunah wal Jama'ah dan menggunakan jalan pendekatan (madzhab): bidang aqidah mengikuti imam Abu Hasan Al Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al Maturidi, bidang fiqh mengikuti Abu Hanifah An Nu'man Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hambal, serta bidang tasawuf mengikuti Imam Al Junaid Al Bugdadi dan Imam Al Ghozali seta imam-imam yang lain. NU juga mengikuti pendirian bahwa islam adalah agama yang fitri dan menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki manusia⁷⁰

Sebagai pedoman pamungkas, sikap terpenting yang berkenaan dengan hubungan kemasyarakatan NU adalah landasan utama yang nantinya juga menjadi bagian literatur visi-misi PKB yang di jadikan sebagai landasan dari garis perjuangan PKB. Sikap tersebut sudah menjadi *trade mark* tetap NU, yakni bercirikan *tawassuth* (adil di tengah-tengah kehidupan bersama) dan *i'tidal* (lurus), *tasamuh* (toleran), *tawazun* (seimbang), serta amar ma'ruf nahi mungkar⁷¹.

Pedoman-pedoman di atas yang lebih banyak bersumber dari ajaran pokok NU, sebagian juga menjadi misi PKB. Hubungan PKB-NU yang memunculkan

⁷⁰ Nahrawi, imam, *moralitas politik PKB, Aktualisasi PKB sebagai partai kerja, partai nasional dan partai modern*, MALANG, Averroes press, , 2005 halm 30

⁷¹ Ibid, halm 30

nilai-nilai produksi NU ke dalam tubuh PKB, tidak bisa tidak juga ikut membawa perangkat-perangkat nilai ideologis yang telah digariskan para Kiai. Itu artinya, misi PKB kedepan sebagai partai yang terbuka, moderen, menjunjung profesionalitas sekaligus menjawab tantangan-tantangan kedepan tentu lekat dengan misi yang diemban NU saat ini. Hanya saja, koridor perjuangan yang digariskan atas keduanya cukup jelas: NU berada di luar jalur politik dan meneguhkan misinya melalui perjuangan di luar sistem (pemerintahan), sementara PKB membawa misi tersebut dalam arena kontestasi politik demi memperkuat sekaligus memberikan peluang besar tercapainya visi partai.⁷²

Visi dan misi PKB akan selalu di terjemahkan dalam program perjuangan partai yang menjadi bagian penting dari musyawarah kerja nasional (mukernas), sebagai sebuah refleksi hari ini sebuah perbandingan apa yang menjadi program perjuangan partai dan tingkat (keseriusan) implementasi yang di ikhtisari fungsionaris PKB dengan mengorganisir segala sumber daya partai yang ada menjadi sebuah evaluasi terhadap para elit partai. Dalam mukernas ke I PKB dan silaturahmi alim ulama tahun 1999 misalnya, fokus perjuangan partai adalah *pemberdayaan masyarakat kecil (DPP PKB, membangun politik yang rahmatan lil alamin, 1999)*. Nalar kekuasaan sebagai logika politik memang harus di ambil sebagai ukuran kemenangan partai. Namun yang menjadi garis bawah adalah bahwa kekuasaan adalah bukanlah tujuan final PKB. Kursi-kursi di legislatif maupun eksekutif baik di

⁷² Ibid, halm 31

tingkat lokal maupun nasional adalah media dan alat perjuangan partai yang efektif dalam mengemban perjuangan untuk memberdayakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Selain yang di sebut di atas garis perjuangan politik PKB yang juga tercantum dalam Dalam draft bai'at pengurus Partai Kebangkitan Bangsa tertulis bahwa sebagai Dewan Pengurus Wilayah/Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi/Kab/Kota⁷³ ; kami pengurus partai kebangkitan bangsa selalu setia kepada garis perjuangan partai yaitu;

- 1) *pengabdian kepada Allah SWT, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Ahlussunah Waljamaah*
- 2) *pengurus harus senantiasa berjuang demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-undang Dasar 1945.*
- 3) *pengurus senantiasa mencurahkan tenaga dan pikiran untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, serta terciptanya tatanan nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.*
- 4) *pengurus harus senantiasa mengikuti garis perjuangan Nahdlatul Ulama dan As-Salafus Shalih dalam melaksanakan 'amar ma'ruf nahi munkar,*

⁷³ www.dpp-pkb.org (lihat bai'at pengurus pkb)

7. Makna Dan Lambang⁷⁴



a. Arti Gambar adalah sebagai berikut:

- 1) Bumi dan peta Indonesia, bermakna tanah air Indonesia yang merupakan basis perjuangan Partai dalam usahanya untuk mencapai tujuan partai sebagaimana termaktub dalam pasal 7 Anggaran Dasar
- 2) Sembilan bintang bermakna idealisme partai yang memuat 9 (sembilan) nilai, yaitu kemerdekaan, keadilan, kebenaran, kejujuran, kerakyatan, persamaan, kesederhanaan, keseimbangan, dan persaudaraan.

⁷⁴ <http://www.dpp-pkb.or.id> (lihat makna dan lambang). lihat juga dalam anggaran rumah tangga pkb pasal 1 (tentang makna lambang) dalam AD/ART PKB Tahun 2005

- 3) Tulisan nama Partai dan singkatannya bermakna identitas diri partai yang berfungsi sebagai sarana perjuangan aspirasi politik rakyat Indonesia yang memiliki kehendak menciptakan tatanan kehidupan bangsa yang demokratis;
- 4) Bingkai segi empat dengan garis ganda yang sejajar bermakna garis perjuangan Partai yang menempatkan orientasi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, lahir dan batin, secara sejajar.

b. Arti warna adalah sebagai berikut⁷⁵ :

- 1) Putih, bermakna kesucian, ketulusan dan kebenaran yang menjadi etos perjuangan partai;
- 2) Hijau, bermakna kemakmuran lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi tujuan perjuangan
- 3) Kuning, bermakna kebangkitan Bangsa yang menjadi nuansa pembaharuan dan berpijak pada kemaslahatan umat manusia.

8. Struktur Organisasi⁷⁶

Dalam pembahasan Sub Bab struktur organisasi yang ada dalam Partai Kebangkitan Bangsa yang di jadikan sumber acuan referensi oleh penulis adalah struktur organisasi berdasarkan AD/ART PKB Dari MUKTAMAR KE II yang di adakan di semarang pada tahun 2005 dan tidak menggunakan literature AD/ART PKB

⁷⁵ Ibid..

⁷⁶ Lihat AD/ART PKB Dari MUKTAMAR KE II yang di adakan di semarang

Versi Muktamar Luar Biasa MLB ancol (PKB Kubu Muhsimin Iskandar) atau pun Muktamar Luar Biasa parung (PKB Kubu Gus Dur) yang di lakukan hampir bersamaan pada tahun 2008 dan mengklaim sebagai muktamar luar biasa yang sah sesuai AD/ART PKB dengan beberapa alasan :

- a. Pemerintah melalui surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta Nomor M. HH-67.AH.11.01 Tahun 2008 tertanggal 24 Juli 2008 mengesahkan kepengurusan yang sah Partai Kebangkitan Bangsa, dengan Ketua Umum Muhaimin Iskandar dan Sekretaris Jenderal Lukman Edy. Keputusan itu mengacu pada keputusan Mahkamah Agung yang menetapkan pemecatan Muhaimin dan Lukman Edy tidak sah. Keputusan itu mengembalikan kepengurusan DPP PKB sesuai dengan Muktamar Semarang tahun 2005. Atau mengesahkan kembali Muhaimin sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB dan Lukman Edy sebagai Sekjen Dewan Tanfidz PKB sesuai Keputusan Menhuk dan HAM Nomor M-02.UM.06.08 Tahun 2005 tanggal 8 Juni 2005. Yang juga berarti Ketua Umum Dewan Syuro PKB tetap dipegang Abdurrahman Wahid dan Sekretaris Dewan Syuro PKB adalah Muhyidin Arubusman⁷⁷
- b. Dalam AD/ART PKB Dari MUKTAMAR KE II yang di adakan di semarang pada tahun 2005 dapat di jadikan rujukan struktur organisasi Partai Kebangkitan Bangsa karena AD/ART PKB Dari MUKTAMAR KE II di

⁷⁷ <http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/m/muhaimin-iskandar/berita/index.shtml>

sepakati bersama oleh kedua belah pihak yang berkonflik sebelum pada ahirnya terjadi konflik antara PKB Kubu Gus Dur dan PKB Kubu Muhsimin Iskandar

Di dalam struktur organisasi Partai Kebangkitan Bangsa sesuai dengan AD/ART PKB memiliki struktur organisasi yang terdiri dari

- a. **Dewan Syuro,**(dewan pimpinan kolektif yang terdiri dari para ulama dan para ahli serta mencerminkan representasi daerah, sebagai pemegang amanah kepemimpinan partai tertinggi di setiap tingkatan beranggotakan beberapa orang sesuai dengan kebutuhan)⁷⁸

Susunan Dewan Syura Dewan Pengurus Pusat (DPP) terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris dan beberapa orang anggota. Sedangkan susunan Dewan Syura Dewan Pengurus Wilayah (DPW), Dewan Pengurus Cabang (DPC), Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC), Dewan Pengurus Ranting (DPRt) dan Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris dan beberapa orang anggota (lihat ART ayat 8) yang memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban (lihat ART PKB dalam hal lampiran)

⁷⁸ Lihat pasal 20 ART PKB

- b. **Dewan Tahfidz**, (Dewan Pelaksana Harian yang bertugas mengelola organisasi dan program partai di setiap tingkatan) yang memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban (lihat ART PKB dalam hal lampiran)⁷⁹

Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat (DPP) terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara (lihat ART ayat 8)

Dewan Tanfidz mulai dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) sampai Dewan Pengurus Anak Ranting (DPART) terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, dan beberapa Wakil Bendahara.(pasal 9)

Maksud dan tujuan dari Struktur organisasi PKB di atas yang terdiri dari dewan syuro dan dewan tahfidz, di maksudkan agar terjadi *chak and balance* dalam partai karena menurut Pasal 16 AD ART PKB, Dewan Tanfidz tidak bisa jalan sendiri tanpa Dewan Syuro.

Selain itu upaya untuk terjadi chake and balance dalam partai PKB ini bisa di lihat dalam keterangan pasal 21 (10) poin (b). yang menyatakan seorang ketua umum tidak memiliki wewenang yang sangat absolute, karena ketua dewan tahfidz hanya Menjalankan pedoman umum kebijakan-kebijakan utama Partai yang telah dibuat dan

⁷⁹ Lihat ART PKB pasal 21

ditetapkan oleh Dewan Syura, dan pasal 21 (12) poin(a dan b) yang menyatakan bahwa (a) seorang ketua dewan tahdfidz Membuat dan menjalankan kebijakan-kebijakan strategis Partai sebagai penerjemahan dari pedoman umum kebijakan-kebijakan utama Partai yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Dewan Syura. dan poin (b) Menentukan pola pengelolaan kebijaksanaan, program dan kegiatan partai sesuai dengan pedoman umum kebijakan-kebijakan Utama Partai yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Dewan Syura serta berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forum-forum permusyawaratan partai, dan peraturan Partai.

Struktur organisasi Partai Kebangkitan Bangsa sesuai dengan AD/ ART PKB memiliki Kepengurusan di pusat. Provinsi. Kab/kota. Kecamatan, desa/ kelurahan hingga ke dusun/lingkungan/kawasan/pemukiman. Di jelaskan sebagai berikut:

- a. Ditingkat pusat di sebut pengurus **DPP (Dewan Pengurus Pusat)** sesuai pasal 12 ART PKB yang memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban (lihat ART PKB dalam hal lampiran)
- b. Ditingkat provinsi di sebut pengurus **DPW (Dewan Pengurus Wilayah)** pasal 13 ART PKB yang memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban (lihat ART PKB dalam hal lampiran)
- c. Ditingkat kab/kota di sebut pengurus **DPC (Dewan Pengurus Cabang)** pasal 14 ART PKB yang memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban (lihat ART PKB dalam hal lampiran)

- d. Ditingkat kecamatan di sebut pengurus **DPAC (Dewan Pengurus Anak Cabang)** pasal 15 ART PKB yang memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban (lihat ART PKB dalam hal lampiran)
- e. Ditingkat desa/kelurahan di sebut pengurus **DPRT (Dewan Pengurus Ranting)** pasal 16 ART PKB yang memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban (lihat ART PKB dalam hal lampiran)
- f. Ditingkat Dusun/ lingkungan/ kawasan pemukiman sebut pengurus **DPART (Dewan Pengurus Anak Ranting)** pasal 17 ART PKB yang memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban (lihat ART PKB dalam hal lampiran)

B. Gambaran umum objek penelitian (DPW Partai Kebangkitan Bangsa Povinsi DIY)

1. Gambaran umum DPW PKB di DIY

Kantor Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB DIY beralamatkan di Jln. Sukonandi no 15 yogyakarta. Telp/fax 0274-513574 (depaan kantor DEPAG provinsi DIY). DPW berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan pada tingkat provinsi yang bersifat kolektif, dan bertugas untuk menyelenggarakan fungsi teknis partai di wilayah provinsi tersebut. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di wilayah provisi, DPW PKB DIY menyelenggarakan kegiatan Musyawarah wilayah, Musyawarah Kerja Wilayah, Musyawarah Pimpinan Wilayah⁸⁰.

⁸⁰ Lihat ART PKB BAB III struktur organisasi partai dalam pasal 13

Untuk memperluas dan membesarkan pengaruh partai di tingkat provinsi, DPW membentuk satu tim yang bertugas mencari figu-figur di tiap-tiap daerah tingkat II (Kabupaten/ Kota) yang kemudin direkomendasikan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan disahkan untuk menjadi pengurus partai di tingkt II (kabupten/kota). Organissi pada tingkt Kabupaten/ Kota dinamakan Dewan Pengurus Cabang (DPC). Setelah terbentuknya DPC pada suatu kabupaten, maka pihak DPW menginstruksikan kepada pengurus DPC untuk mencari figur yang akan di rekomendasikan dan disahkan untuk menjadi pengurus partai di tingkat kecamatan. organisasi pada tingkat ini dinamakan Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC)⁸¹.

DPW PKB DIY peratma kali di deklarasikan di jogjakarta sesuai dengan surat keputusan No 036/DPP-02/A,.1/IX/1998 tertanggal 15 september 1998 Tentang Pengesahan DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA Daerah Istimewa Yogyakarta, maka DPW PKB di resmikan tanggal 15 september 1998, ketika itu Yang menjabat sebagai ketua dewan syuro adalah **KH.Ahmad Warson Munawwir** dan sekretaris dewan syuronya adalah **H.Muhamad hasyim SH**. Sedangkan yang menjabat sebagai Ketua Dewan Tanfidz pertama pada saat itu adalah Drs. H. Aly as'ad dan sekretaris dewan tahfidznya adalah Drs. H. Nur Ahmad Afandi, MM. mereka itulah tokoh-tokoh yang mendirikan

⁸¹ Ibid.

PKB di DIY⁸² lama masa jabatan mereka sesuai surat keputusan No 036/DPP-02/A,.1/IX/1998 adalah 1998 sampai 1999 dan di perpanjang lagi sampai 2001 ketika MUSWIL pertama di adakan.

Muswil pertama DPW PKB DIY diadakan Yogyakarta pada tahun 2001 dimana hasil Muswil tersebut menempatkan kembali **KH.Ahmad Warson Munawwir** sebagai Ketua Dewan Syuro dan sekretaris dewan syuronya adalah **H. Nuruddin Amin S.ag** Dan yang menjadi Ketua Dewan Tanfidz setelah Muswil I DPW PKB DIY adalah **KH. Muhjab Mahali** dan sekretaris dewan tahfidznya adalah **Drs. H. Nur achmad Afandi MBA** adapun lama masa jabatan pengurus DPW PKB DIY hasil Muswil I seharusnya selama lima tahun(2001-2006)⁸³.

Namun karena pada tahun 2004 menjelang pemilu legislatif 2004 ketua dewan tahfidz DPW PKB **KH. Muhjab Mahali** meninggal dunia dan Sesuai hasil rapat pengurus DPW PKB maka jabatan ketua dewan tahfidznya di serahkan kepada **Hj. Ida Fatimah ZA** sebagai pejabat sementara (PJS). Namun hal ini tidak berjalan sinkron dengan kemauan DPP PKB. karena PJS tidak mematuhi keputusan yang telah di buat DPP. Salah satu keputusan yang tidak dipatuhi adalah soal daftar calon legislatif. Ida Fatimah sebagai Pejabat sementara Ketua DPW mengeluarkan daftar calon legislatif untuk DPRD DIY. Namun bersamaan dengan itu, DPP juga

⁸² Keterangan : Tanpa mengecilkkan peran tokoh tokoh lain dari NU, dan organisasi-organisasi otonomnya (IPNU,IPPNU,ANSOR,BANSER Dll)yang duduk di lingkungan jabatan struktural maupun tidak,

⁸³ Lihat hal lampiran : surat keputusan no. 0363/DPP-01/A.I/XII/2001 tertanggal 10 desember 2001 Tentang Pengesahan DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA Daerah Istimewa Yogyakarta

mengeluarkan daftar lain. Selanjutnya, DPW DIY mengabaikan daftar yang dikeluarkan DPP serta tetap menggunakan daftar yang dibuat sendiri. "Itu menunjukkan terjadi ketidaksinkronan antara DPP dan DPW. Selain juga tentu ada masalah lain. Hal itulah yang menjadi alasan DPP untuk membekukan DPW PKB DIY. maka kepengurusan DPW PKB DIY secara resmi dibekukan oleh DPP melalui surat DPP No 01663/DPP 02/III/A.I/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004 Selain surat pembekuan, DPP mengeluarkan Surat Keputusan No 01713/DPP-02/III/A.I/IX/ 2004 tertanggal 16 September 2004 tentang Pembentukan Tim Resolusi yang langsung ditandatangani Ketua Dewan Syuro PKB KH Abdurrahman Wahid dan Sekretaris Arifin Junaidi serta ketua umum PKB Alwi Shihab dan Sekjen Muhaimin Iskandar.⁸⁴

Tim Resolusi ini diketuai **Dr. H. Lalu Misbah Hidayat** dan sekertarisnya adalah **Suharno PA. SH.** Tim ini bertugas menggelar Muswil secepatnya untuk membentuk kepengurusan yang baru. pembekuan kepada pengurus DPW PKB DIY dilakukan karena setelah meninggalnya Ketua Dewan Tanfidz PKB DIY, KH Mujab Mahali, terjadi ketidaksinkronan antara DPW dan DPP. tim resolusi ini juga menyatakan anggota legislatif DIY dari PKB tetap akan menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya dan pembekuan tidak akan berpengaruh pada anggota DPRD⁸⁵.

⁸⁴ Lihat hal lampiran : surat keputusan no. No 01713/DPP-02/III/A.I/IX/ 2004 Tentang Tim resolusi DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA Daerah Istimewa Yogyakarta

⁸⁵ Lihat juga DPW PKB DIY DI BEKUKAN dalam <http://www.mail-archive.com/kmnu2000@yahoogroups.com/msg01193.html>

Pada tahun 2005 di adakan muswil di DPW PKB yang agendanya adalah memilih ketua dewan tahfidz dan pengurus yang baru sesuai hasil kinerja Tim resolusi yang bertugas untuk melaksanakan Muswil dan memilih pengurus yang baru. Pada muswil tahun 2005 ini yang menjadi pemenang ketua dewan tahfidz dalam pemilihan adalah **H. Sukamto, SH** namun karena permasalahan internal SK yang turun dari DPP sebagai pemenang adalah **H. Agus wiyarto SE**.

Meski terjadi *gonta-ganti* pengurus DPW PKB di DIY (tercatat kepengurusan 2005-2010 berganti sebanyak 4 kali, hal ini terjadi karena masalah konflik internal pengurus PKB ada yang berpihak pada kubu Gus Dur Cak Imin pasca muktamar II semarang, ada yang keluar dari PKB dan bergabung dengan PKNU dan kemudian ada yang berpihak pada kubu Gus Dur dan ada yang berpihak pada Muhaimin) agus wiyarto baru turun dari jabatan ketua dewan tahfidz DPW PKB DIY setelah di sahkanya PKB Muhaimin oleh pemerintah dan langkah yang di ambil oleh PKB Muhaimin adalah mengembalikan kepengurusan DPW PKB DIY seperti hasil muswil 2005 dimana **Sukamto SH** sebagai pemenang⁸⁶

Setelah 12 tahun berdirinya PKB di DIY (1998-2010) dan sudah mengikuti pemilu ke tiga kalinya (1999.2004.2009), saat ini kepengurusan PKB ada di tiap-tiap Kabupaten/ Kota di DIY yang berjumlah 5 DPC. Berikut tabel nama-nama DPC PKB yang ada di DIY

⁸⁶ Lihat Juga Berita Dalam <http://www.lintasberita.com/go/146219>

Tabel 2.1 DPC-DPC dan DPAC PKB DIY⁸⁷

NO	Nama DPC	Kabupaten/ Kota	Alamat	Jumlah DPAC
1	DPC PKB KOTA YK	Kota madya yogyakarta	Jln. Sukonandi no 15 yogyakarta Telp. (0274) 513574	14
2	DPC PKB SLEMAN	Kabupaten sleman	Jln. KRT. Pringgo diningrat no:1 Tridadi sleman. Telp. (0274) 8657652 (0274) 864706	17
3	DPC PKB BANTUL	Kabupaten bantul	Jln. Parang tritis Km 10 dadapan sewon bantul. Telp.(0274)6463450	17
4	DPC PKB G.KIDUL	Kabupaten gunung kidul	Jln.ki ageng giring trimulyo II kepek wonosari GK Telp.	18
5	DPC PKB K.PROGO	Kabupaten kulon progo	Wates kulon progo Telp. (0274) 775273	12
	jumlah			78

Sumber : Diolah dari data dokumen DPW PKB DIY

Pada kepengurusan yang sekarang ini, kelengkapan partai tingkat provinsi yang di miliki antara lain :biro, lembaga, badan otonom⁸⁸.

- a. **Biro** adalah kelengkapan partai di daerah provinsi yang berfungsi sebagai unit pelaksana program program dewan pengurus wilayah (DPW). Dan biro biro di bentuk dan di kordinasikan oleh dewan pengurus wilayah (DPW)

⁸⁷ Hasil wawancara dengan mas DAUD (bagian administrasi kantor DPW PKB. Cp. 085643848565) pada tanggal 10-11-2010 di kantor DPW PKB

⁸⁸ Lihat Anggaran rumah tangga pkb bab VII tentang kelengkapan partai pasal 27,30 dan 31

- b. **Lembaga-lembaga** adalah Lembaga adalah perangkat khusus Partai yang merupakan alat pengabdian dan perjuangan Partai dalam bidang-bidang agama, politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan,
- c. **Badan otonom** adalah perangkat partai yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan partai, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan merupakan basis massa serta sumber kader Partai di berbagai segmen dan/atau lapisan sosial masyarakat, Badan Otonom dapat dibentuk berdasarkan kepentingan perjuangan partai yang berkaitan dengan bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan, yang pelaksanaan dan pencapaiannya memerlukan garis instruksi dan/ atau konsolidasi dan/ atau koordinasi secara mudah, cepat, efektif dan efisien

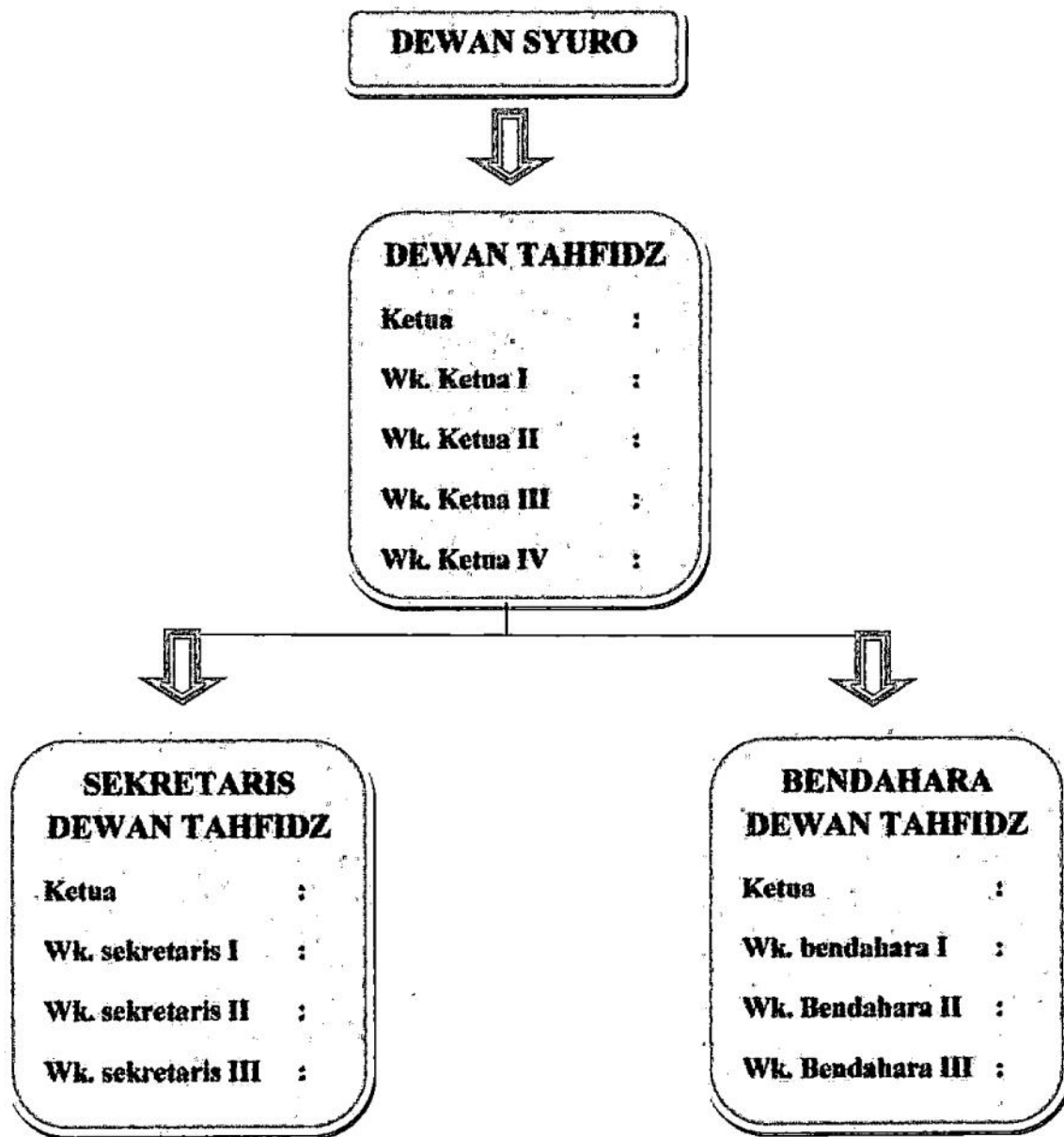
Sesuai dengan surat keputusan kerja wilayah (muskerwil) DPW PKB DIY No. 02 Muskerwil/DPW PKB-DIY/SK/VIII/2007 tertanggal 22 agustus 2007 tentang program kerja DPW PKB DIY priode 2005-2010 Memutuskan bahwa ⁸⁹:

- 1) Alat kelengkapan partai **biro terdiri dari:**
 - a) Biro Pemuda Dan Mahasiswa
 - b) Biro Hubungan Masyarakat Dan Pesantren
 - c) Biro Media Massa Dan Pengembangan Opini
 - d) Biro Tenaga Kerja, Buruh Dan Nelayan

⁸⁹ Lihat hal lampiran : program kerja pengurus wilayah partai kebangkitan bangsa profinsi daerah istimewa yogyakarta 2005-2010

- e) Biro dakwah, seni dan budaya.
- 2) Alat kelengkapan partai lembaga-lembaga terdiri dari :
- a) Lembaga penelitian dan pemenangan pemilu (PAPILU)
 - b) Lembaga pendidikan dan pelatihan kader
 - c) Lembaga advokasi hukum dan hak asasi manusia
- 3) Alat kelengkapan partai badan otonom terdiri dari :
- a) Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa yang disingkat GARDA
BANGSA
 - b) Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa yang disingkat PPKB

Bagan 2.1
struktur kepengurusan DPW PKB DIY 2005-2010



⁹⁰ **Keterangan** : Dewan syuro PKB juga memiliki struktur yang sama dengan dewan tadfiz yang terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris dan beberapa orang anggota

**SUSUNAN DEWAN PENGURUS WILAYAH PKB DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2005-2010**

Surat keputusan

No. 01809/DPP-02/III/A/II/2005

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 januari 2005

JABATAN

NAMA

❖ **DEWAN SYURO**

Ketua	KH. Muhammad Fadlan
Wakil Ketua	KH. Zamaksari
Wakil Ketua	KH. Mabarun
Sekretaris	H. Sholehudin, S.Ag
Wakil Sekretaeis	Drs. H.M Nasikh Ridwan
Wakil Sekretaeis	KH. R Hafidz Abdul Qodir
Anggota	Hj. Ida Fatimah ZA
Anggota	KH. Daenuri Noor
Anggota	H. Muslikh Mukhtar

❖ **DEWAN TANFIDZ**

Ketua	R. H. Agus Wiyarto, SE
Wakil Ketua	Drs. H. Muhammad Wachid, MM
Wakil Ketua	Agus Sulistiyono
Wakil Ketua	H. Tohari
Wakil Ketua	Budi Rizaldi
Wakil Ketua	Hj. Muslimatin Afnan
Sekretaris	Sukoyo, S.Ag
Wakil Sekretaeis	Drs. Mustofa MF.
Wakil Sekretaeis	Sudaryanto, SH.
Wakil Sekretaeis	Hj. Elya Kristin Subchi
Wakil Sekretaeis	Fachrurrozi, S.Ag. M.Si.
Bendahara	Yuswantoro
Wakil Bendahara	Mohammad Nastani, S.Ag.
Wakil Bendahara	Budi Maryanto, SE.
Wakil Bendahara	Dewi Zulaekhah
Wakil Bendahara	Drs. Sudarmanto

**SUSUNAN DEWAN PENGURUS WILAYAH PKB DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2005-2010**

Surat keputusan

No. 0814SDPP-02/III/A.I/I/2005

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 February 2005

JABATAN

NAMA

❖ DEWAN SYURO

Ketua	KH. Zamaksari
Wakil Ketua	KH. Mabarun
Wakil Ketua	KH. R Hafid Abdul Qodir
Sekretaris	H. Sholehudin, S.Ag
Wakil Sekretaeis	Ir. Chamdi buldan MT
Wakil Sekretaeis	Ahmad Muwafiq S.Ag
Anggota	K. Mukhibin
Anggota	M. Qostholani chadiq as
Anggota	Drs. Muhamad idris p .MM

❖ DEWAN TANFIDZ

Ketua	R. H. Agus Wiyarto, SE
Wakil Ketua	Drs. H. Muhammad Wachid, MM
Wakil Ketua	Agus Sulistiyono
Wakil Ketua	K. muhamad thohari
Wakil Ketua	Budi priono
Sekretaris	Sukoyo, S.Ag
Wakil Sekretaeis	Drs. Mustofa MF.
Wakil Sekretaeis	Sudaryanto, SH.
Wakil Sekretaeis	Hj. Elya Kristin Subchi
Wakil Sekretaeis	Fachrurrozi, S.Ag. M.Si.
Bendahara	Ir Yuswantoro MM
Wakil Bendahara	Mohammad Nastani, S.Ag.
Wakil Bendahara	Budi Maryanto, SE.
Wakil Bendahara	Drs. Sudarmanto

**SUSUNAN DEWAN PENGURUS WILAYAH PKB DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2005-2010**

Surat keputusan

No. 2168/DPP-02/IV/A.II/1/2007

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2007

JABATAN	NAMA
❖ DEWAN SYURO	
Ketua	KH. Zamaksari
Wakil Ketua	KH. Mabarun
Wakil Ketua	KH. R Hafid Abdul Qodir
Wakil ketua	Drs. Muhamad idris p .MM
Sekretaris	H. Sholehudin, S.Ag
Wakil Sekretaeis	Ahmad Muwafiq S.Ag
Wakil Sekretaeis	M. Qostholani chadiq as
Anggota	K. Mukhibin
Anggota	Drs. H. Muhamad wachid MM
❖ DEWAN TANFIDZ	
Ketua	R. H. Agus Wiyarto, SE
Wakil Ketua	Ir. Hamdi buldan MT
Wakil Ketua	K. muhamad thohari
Wakil Ketua	H. Abdul halim muslih
Wakil Ketua	H. Agus Sulistiyono
Sekretaris	Sukoyo, S.Ag
Wakil Sekretaeis	Drs. Mustofa MF.
Wakil Sekretaeis	Fachrurrozi, S.Ag. M.Si.
Wakil Sekretaeis	Muhyi darmaji S.Ag M.Pd.i
Wakil Sekretaeis	Sudaryanto, SH.
Bendahara	Ir Yuswantoro MM
Wakil Bendahara	Drs. Sudarmanto
Wakil Bendahara	Mohammad Nastani, S.Ag.
Wakil Bendahara	M. Nurman As

**SUSUNAN DEWAN PENGURUS WILAYAH PKB DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2005-2010**

Surat keputusan

No. 3636/DPP-03/V/A.I/VIII/2008

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2008

JABATAN	NAMA
❖ DEWAN SYURO	
Ketua	KH. Zamakhsyari
Wakil Ketua	Hj. Ida Fatimah ZA M.Si
Wakil Ketua	KH. Mabarun
Wakil Ketua	KH. R Hafidz Abdul Qodir
Wakil Ketua	Drs. Muhammad Idris P.MM
Sekretaris	H. Sholehudin, S.Ag
Wakil Sekretaeis	Anwar, S.Hi
Wakil Sekretaeis	M. Qostholani Chadiq AS
Anggota	K. Mukhibin
Anggota	Drs. H. Muhammad Wahid, MM
Anggota	Drs. H. Amin Nor Yosep
Anggota	KH. Mohammad Abbas
Anggota	KH. Rochmad Bin Asyrofi
Anggota	KH. Zamhari
❖ DEWAN TANFIDZ	
Ketua	H. Sukamto, SH
Wakil Ketua	Ir. Hamdi Buldan, MT
Wakil Ketua	K. Muhammad Tohari
Wakil Ketua	H. Abdul Halim Muslih
Wakil Ketua	H. Abdul Qowi
Sekretaris	Sukoyo, S.Ag
Wakil Sekretaeis	Arifuddin
Wakil Sekretaeis	M. Fahrur Rozi
Wakil Sekretaeis	Sudaryanto, SH
Wakil Sekretaeis	Eka Eny Setyaningsih, S.Hi
Bendahara	Nunutrubiyanto
Wakil Bendahara	Mohammad Nastani
Wakil Bendahara	Sri Wahyuni, SE. ST. MM